

PROGRAM KEMITRAAN KEBUN KELAPA SAWIT RAKYAT (KKSAR) SEBAGAI ALTERNATIF POLA PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT RAKYAT

Muhammad Akmal Agustira, Rizky Amelia, dan Teguh Wahyono

Abstrak Program Kebun Kelapa Sawit Rakyat (KKSAR) adalah pola pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat melalui kemitraan antara perusahaan (sebagai penyedia bibit, penyuluhan dan pemasaran), pemerintah (sebagai penyedia sarana produksi, dan *land clearing*) dan pekebun rakyat (lahan dan tenaga kerja). KKSAR ini pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Bangka. KKSAR dapat dijadikan alternatif pola pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat ditengah tidak ada pola pendanaan kredit setelah PIR dan KKPA, serta terhambatnya pelaksanaan revitalisasi perkebunan rakyat. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme pelaksanaan kemitraan KKSAR, menganalisis tingkat kesejahteraan pekebun KKSAR dan mengidentifikasi kendala dan upaya perbaikan hubungan kemitraan KKSAR. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menerapkan metode survey dengan wawancara mendalam (*indepth interview*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola ini sedikit berbeda dengan pola pengembangan kelapa sawit rakyat lainnya seperti KKPA, PIR maupun revitalisasi perkebunan. Bibit dan sarana produksi selama masa pembangunan dihitung sebagai beban kredit pekebun KKSAR tanpa bunga. Proporsi pendapatan kebun KKSAR menempati 63,99% dari total pendapatan keluarga yang menunjukkan kebun KKSAR sangat membantu perekonomian keluarga pekebun. Kendala dalam pelaksanaan KKSAR yaitu status lahan, administrasi pengadaan sarana produksi, PKS tanpa kebun, konsistensi pendampingan, transparansi harga, keterlambatan sarana produksi, dan infrastruktur. Dengan upaya perbaikan dari kendala yang dihadapi

di Kabupaten Bangka, KKSAR dapat diadopsi sebagai alternatif pola kemitraan dalam mendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Kata kunci : Kemitraan, pengembangan, perkebunan, kelapa sawit, rakyat

Abstract Oil palm smallholder scheme (KKSAR) is oil palm smallholder development pattern through a partnership among the plantation company (as a provider of seeds, agricultural assistance and marketing), government (as a provider of production facilities, and land clearing) and the smallholders (land and manpower). KKSAR was firstly implemented in the District of Bangka. KKSAR may be an alternative development pattern of smallholder oil palm plantation when there is no pattern of credit financing after PIR and KKPA, and hampering of the plantation revitalizations. This research aims to identify the mechanism of implementation KKSAR scheme, analyze the level of welfare KKSAR planters and identify constraints and efforts to improve KKSAR scheme. This research is descriptive method by applying the survey with in-depth interviews. The results showed that the scheme is slightly different from the pattern of oil palm development of others like KKPA, PIR and plantation revitalization. Seedling and input production during the construction period is calculated as the KKSAR smallholder's credit without interest. KKSAR arif plantation yield overcome 63.99% of total family income shows KKSAR smallholders greatly help the family economy. Constraints in the implementation of KKSAR are the status of land, the administration of the procurement of production inputs, mill without plantation, consisten assistency, transparency of prices, delays in production facilities, and

Penulis yang tidak disertai dengan catatan kaki instansi adalah peneliti pada Pusat Penelitian Kelapa Sawit

Muhammad Akmal Agustira (✉)
Pusat Penelitian Kelapa Sawit
Jl. Brigjen Katamsno No. 51 Medan, Indonesia
Email : agustira_akmal@yahoo.com

infrastructure. Consistently by the company's mentoring, communication, transparency, the realization of planned measures, consistent with and support the implementation commitment appropriate government policies through regulations and legislation to efforts in the implementation of KKSR scheme.

Keywords : *Partnership scheme, development, oil palm plantation, smallholder*

PENDAHULUAN

Kemitraan merupakan salah satu solusi untuk mengintegrasikan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan usaha pengolahan hasil perkebunan (UU perkebunan No 18 tahun 2004 pasal 22). Pada umumnya kemitraan dalam perkebunan kelapa sawit muncul akibat ketidakmampuan perusahaan dan petani dalam menangani kendala dalam usahatani kelapa sawit yang dikelola. Hal ini terkait dengan keterbatasan perusahaan perkebunan dalam kepemilikan lahan untuk memperbesar kapasitas produksinya sedangkan petani terbatas dalam kepemilikan modal dan pengetahuan budidaya dan manajemen perkebunan (Suci, 2011).

Cikal bakal kemitraan perkebunan rakyat dimulai pada tahun 1977 dimana dibentuk Pola Inti Plasma (PIR). Pola PIR ini berkembang dalam dalam berbagai pola meliputi PIR-Lokal, PIR-khusus, PIR-Trans yang dananya bersumber dari pinjaman luar negeri maupun dananya dari pemerintah melalui Departemen Pertanian. Konsepsi pola PIR merupakan pengembangan perkebunan rakyat dimana perkebunan besar sebagai inti, yang membantu dan membimbing rakyat sekitarnya sebagai plasma dalam satu sistem kemitraan yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan (Badrun, 2010).

Konsepsi PIR terus berkembang dengan memperoleh pendanaan dari dana likuiditas bank Indonesia yang berlabel Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) (Anwar dan Herwany, 2011). Pada tahun 1999, pola KKPA berhenti karena tidak ada lagi sumber dana yang menyertainya (Herman dan Fadjar, 2000). Pada tahun 1999 terbentuk 5 pola pola pengembangan berdasarkan SK

Menhutbun NO 107/Kpts-II/1999 yaitu (1) Pola Koperasi Usaha Perkebunan, (2) Pola Patungan Koperasi dan Investor (3) Pola Patungan Investor koperasi (4) Pola Built Operation Transfer (BOT) dan (5) Pola Bank Tabungan Negara (BTN). Namun pola ini tidak berkembang dengan baik karena tidak didukung ketersediaan kredit berbunga lunak untuk para pekebun rakyat (Fadjar, 2006).

Seiring dengan prospek minyak sawit yang semakin menjanjikan, minat pekebun rakyat untuk menanam kelapa sawit sangat tinggi. Namun minimnya pola pengembangan yang disertai dengan kemitraan, menyebabkan banyaknya pekebun rakyat membangun kebun kelapa sawitnya secara swadaya. Kurangnya bimbingan dan arahan dalam pengembangan kelapa sawit swadaya menyebabkan produktivitas perkebunan rakyat jauh dari potensi yang diharapkan. Meluasnya penggunaan benih palsu di perkebunan sawit swadaya, kurangnya pemahaman mengenai kultur teknis, lemahnya modal dan kelembagaan merupakan penyebab rendahnya produktivitas perkebunan rakyat swadaya (Rifai *et al.*, 2008).

Kondisi tersebut disikapi pemerintah dengan program revitalisasi perkebunan pada tahun 2006. Program ini didukung kredit investasi perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah dengan melibatkan perusahaan perkebunan sebagai mitra dalam pengembangan perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil. Namun program ini mengalami berbagai masalah yang berhubungan dengan tumpang tindih status kepemilikan lahan, kelengkapan administratif calon petani, koperasi yang kurang aktif, kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintahan, kesiapan perusahaan mitra sebagai avalis, serta birokrasi pengurusan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional, dan persyaratan kredit oleh bank pelaksana yang dianggap sulit bagi petani (Dja'far *et al.*, 2010). Kondisi tersebut menyebabkan rendahnya realisasi kredit revitalisasi kelapa sawit dimana hingga 2011 baru mencapai 164.834 hektar atau 11 % dari target 1.500.000 hektar (Zuhri, 2011).

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 telah mengatur mengenai kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan pola kemitraan dengan membangun

kebun masyarakat paling rendah seluas 20% dari luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan. Kesulitan dalam penerapan kemitraan dengan program revitalisasi dan tidak adanya program lainnya yang mendapatkan sumber dana pinjaman tanpa subsidi bunga, menyebabkan banyak perusahaan kesulitan dalam menerapkan peraturan menteri pertanian Nomor 26 tahun 2007 pasal 11. Peraturan tersebut mewajibkan perusahaan untuk membangun kebun untuk masyarakat paling rendah 20% dari total luas areal yang diusahakan. Hal ini juga menjadi permasalahan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat.

Salah satu alternatif pengembangan perkebunan rakyat adalah melalui program Kebun Kelapa Sawit Rakyat (KKSR). Program KKSR adalah pola pengembangan perkebunan rakyat yang mensinergikan perusahaan perkebunan, pemerintah dan masyarakat melalui pinjaman selama investasi pembangunan kebun tanpa bunga dalam bentuk penyediaan bibit dan bantuan teknis oleh perusahaan, sarana produksi oleh pemerintah daerah serta penyedia lahan dan tenaga kerja oleh masyarakat. Pola KKSR di Indonesia baru dilakukan di Kabupaten Bangka oleh PT. Sawindo Kencana bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung. Pola ini menjawab permintaan masyarakat akan pola pembiayaan alternatif setelah suksesnya pelaksanaan program Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) yang sebelumnya telah dilakukan oleh PT Sawindo Kencana. Dengan adanya pola KKSR diharapkan dapat menjadi alternatif pola kemitraan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan :

- 1) Mengidentifikasi mekanisme pelaksanaan kemitraan KKSR antara perusahaan, pemerintah daerah, dan pekebun rakyat, kemudian membandingkannya dengan pola lainnya.
- 2) Menganalisis tingkat keuntungan dan kontribusi pendapatan pekebun kelapa sawit rakyat peserta program KKSR terhadap total pendapatan rumah tangga.
- 3) Mengidentifikasi dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan dan upaya perbaikan hubungan kemitraan KKSR.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menerapkan metode survey. Lokasi penelitian dilakukan secara *purposive* yaitu Kabupaten Bangka dan Bangka Barat yang merupakan daerah pengembangan pola KKSR. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan responden yang merupakan anggota kelompok tani yang mengikuti program KKSR untuk dimintai keterangan oleh peneliti dengan pertimbangan bahwa calon responden tersebut mengetahui hal-hal yang terkait dengan pola KKSR.

Data yang dikumpulkan adalah data sosial ekonomi petani, sumber permodalan, pola usahatani, praktek budidaya, pasar dan informasi kebijakan pembangunan perkebunan kelapa sawit rakyat. Teknik pengumpulan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*) dilengkapi dengan lembar kuesioner, dengan sampel berlapis per golongan pekebun sebanyak 50 orang, termasuk penentu kebijakan provinsi dan kabupaten serta perusahaan. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, kemudian hasil analisis data tersebut digunakan untuk menjawab tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pembentukan KKSR

Program Kelapa Sawit Rakyat (KKSR) adalah pola pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat dengan mensinergikan tiga pilar yaitu perusahaan perkebunan, masyarakat dan pemerintah dalam suatu jalinan kerja sama yang saling menguntungkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan kebun kelapa sawit. Pola Kebun Kelapa Sawit Rakyat (KKSR) pertama kali dirintis sejak tahun 2003 oleh PT. Sawindo Kencana (SWK) dan Pemkab Bangka, dan pada 2004 dilaksanakan program KKSR dengan luas areal 250 Ha. Kesuksesan program KKSR pada tahun 2004, membuat Pemkab Bangka dan PT SWK membentuk pola KKSR tahap kedua pada tahun 2007 seluas 432 ha. Kesuksesan KKSR di Kabupaten Bangka diikuti oleh Kabupaten Bangka Barat dengan membentuk pola KKSR di daerahnya dengan luas 425 ha, sehingga pola KKSR yang dikembangkan PT.SWK bekerjasama dengan Pemkab Bangka dan Bangka Barat mencapai 1.107 ha dengan jumlah pekebun rakyat mencapai 559 KK (Tabel 1).



Tabel 1. Jumlah peserta dan luasan program KKSR di Kabupaten Bangka dan Bangka Barat.

| Kabupaten | Desa | KKSR 2004 | | KKSR 2007 | | Total KKSR | |
|---------------------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | Jlh Pekebun (KK) | Luas Areal (Ha) | Jlh Pekebun (KK) | Luas Areal (Ha) | Jlh Pekebun (KK) | Luas Areal (Ha) |
| Bangka | Kotawaringin | 25 | 50 | 21 | 42 | 46 | 92 |
| | Tanah Bawah | 25 | 50 | 25 | 50 | 50 | 100 |
| | Saing | 25 | 50 | 29 | 58 | 54 | 108 |
| | Labu | 29 | 58 | 26 | 52 | 55 | 110 |
| | Nibung | 21 | 42 | 36 | 72 | 57 | 114 |
| | Sempan | - | - | 32 | 64 | 32 | 64 |
| | Neknang | - | - | 25 | 50 | 25 | 50 |
| | Pangkal Niur | - | - | 22 | 44 | 22 | 44 |
| Total | | 125 | 250 | 216 | 432 | 341 | 682 |
| Bangka Barat | Tempilang | - | - | 3 | 6 | 3 | 6 |
| | Buyan | - | - | 52 | 104 | 52 | 104 |
| | Kelumbi | - | - | 22 | 44 | 22 | 44 |
| | Tanjung Niur | - | - | 22 | 43 | 22 | 43 |
| | Sinar Surya | - | - | 21 | 32 | 21 | 32 |
| | Pusuk | - | - | 98 | 196 | 98 | 196 |
| | Total Barat | | - | - | 218 | 425 | 218 |
| Total Program KKSR | | 125 | 250 | 434 | 857 | 559 | 1.107 |

Sumber : data primer, diolah

Pola pengembangan KKSR sedikit berbeda dengan pola pengembangan perkebunan yang pada umumnya diterapkan di Indonesia yaitu PIR, KKPA dan revitalisasi perkebunan. Perbandingan pola KKSR dengan pola pengembangan perkebunan kelapa sawit lainnya terdapat pada Tabel 2.

Pola KKSR merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam pengembangan perkebunan rakyat yang melibatkan perusahaan perkebunan sebagai penyedia bibit unggul, bantuan teknis dan jaminan pemasaran, pemerintah daerah sebagai penyedia input produksi (pupuk, petstisida, herbisida, dan alat pertanian) termasuk biaya *land clearing*, sedangkan pekebun rakyat sebagai penyedia lahan dan tenaga kerja. Bibit dan sarana produksi yang diberikan

sebagai pinjaman tanpa bunga yang disalurkan kepada kelompok tani yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan perusahaan. Besaran biaya investasi dibukukan dalam neraca hutang kelompok tani yang bersangkutan. Bantuan sarana produksinya diberikan selama masa investasi pembangunan kebun selama 3 tahun. Petani program berkewajiban untuk menjual semua hasil produksi TBS kepada PKS perusahaan berdasarkan rumus perhitungan harga TBS dalam peraturan yang berlaku setiap bulannya, selama tanaman masih produktif dan perusahaan dapat menarik cicilan kredit sebesar 30% dari penjualan setiap bulan sampai kredit lunas.

Pola pembiayaan KKSR ini berbeda dari pola-pola lainnya seperti PIR, KKPA dan revitalisasi yang

Tabel 2. Perbandingan KKSR dengan pola pengembangan kelapa sawit rakyat yang ada di Indonesia.

| No | Uraian | PIR | KKPA | Revitalisasi | KKSR |
|----|------------------------------|--|--|--|---|
| 1 | Keperluan Lahan | Lahan milik pemerintah | Lahan Milik Petani | Lahan Milik Petani | Lahan Milik Petani |
| 2 | Sumber Dana | Sumber dana dari pemerintah dan pinjaman luar negeri melalui Bank Indonesia | Sumber dana dari dana likuiditas Bank Indonesia melalui bank komersial | Sumber dana dari Bank Komersial dengan bunga IDC ditanggung oleh pemerintah | Kredit bersumber dari Pemda (sarana produksi) dan perusahaan (bibit unggul dan bimbingan teknis) |
| 3 | Unit Cost | Unit cost ditetapkan Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional | Unit cost (Perusahaan) | Unit cost ditetapkan oleh peraturan menteri pertanian | Unit cost ditentukan oleh jumlah dana dikeluarkan untuk biaya investasi berdasarkan kondisi realisasi di lapangan |
| 4 | Pembebanan Kredit Petani | Beban kredit dihitung berdasarkan unit cost termasuk bunga selama masa pembangunan kebun ditambah overhead cost dan jasa manajemen sebesar 15% | Beban kredit dihitung kebutuhan seluruh biaya pembangunan kebun dan tingkat bunga yang berlaku | Beban kredit dihitung berdasarkan biaya pembangunan kebun ditambah selisih bunga komersial bank pelaksana dengan bunga yang disubsidi pemerintah dan management fee sebesar 5% | Beban kredit dihitung berdasarkan biaya pembangunan kebun, tanpa dikenakan bunga. |
| 5 | Ketentuan Besar Bunga Kredit | Besaran bunga kredit ditentukan pemerintah | Tingkat Bunga Komersial | Bunga kredit yang diberikan sebesar 10%, dengan selisih antara bunga pasar yang berlaku untuk kredit disubsidi selama masa pembangunan | Tidak dikenakan bunga |
| 6 | Peran Perusahaan | Sebagai kontraktor, pembinaan dan pemasaran hasil | Sebagai Avalis, pembinaan dan pemasaran TBS | Perusahaan sebagai avalis, pembinaan, dan pemasaran TBS | Sebagai penyedia bibit, Pembina dan pemasaran hasil |
| 7 | Peran pekebun rakyat | Pengelolaan kelapa sawit setelah konversi | Pengelolaan kelapa sawit setelah konversi melalui koperasi | Melakukan pengelolaan kebun setelah konversi melalui kelompok tani atau koperasi | Tenaga dalam masa pembangunan dan perawatan tanaman setelah menghasilkan |
| 8 | Peran Pemerintah Daerah | Melakukan koordinasi antara perusahaan dengan kelompok tani, dan pembinaan | Melakukan koordinasi antara perusahaan dengan koperasi, dan pembinaan | Melakukan koordinasi antara perusahaan dengan koperasi, pendampingan dan pembinaan, | Penyediaan dana untuk pengadaan input produksi, pendampingan dan pembinaan |
| 9 | Sistem pengelolaan | Dikerjakan langsung oleh petani setelah konversi | Pekerjaan dikordinir oleh koperasi yang dibentuk di setiap blok yang ada. | Pengelolaan dengan Sistem Pola Satu Manajemen (PSM) | Penyediaan dana untuk pengadaan input produksi, pendampingan dan pembinaan |
| 10 | Masa konversi | Dikonversi setelah TM | Dikonversi setelah TM | Dikonversi setelah TM | Dikonversi setelah TM |
| 11 | Pembayaran kredit | Cicilan dipotong dari produksi oleh perusahaan | Cicilan dipotong dari produksi oleh perusahaan | Cicilan dipotong dari produksi oleh perusahaan | Cicilan dipotong dari produksi oleh perusahaan |

Sumber informasi : Rumusan Penulis dari berbagai sumber dan data penelitian

menggunakan dana perbankan dan tanpa melibatkan sumber pembiayaan dari perusahaan maupun pemerintah daerah dengan menggunakan dana APBD. Penggunaan APBD sebagai sumber pembiayaan kebun kemitraan terdapat pada pola pengembangan kebun kemitraan di kabupaten Siak. Pola kemitraan ini disebut sebagai pola kemitraan plus dimana sumber dana pembangunan berasal dari APBD Kabupaten Siak dan Perusahaan yaitu PTPN V sebagai kontraktor pembangunan kebun (Ustha, 2006). Beban kredit yang dikenakan pada kemitraan plus ini adalah biaya pembangunan kebun ditambah dengan *management fee* dan dikenakan bunga sebesar 10% (Ustha, 2006).

Pembebanan biaya investasi KKSR yang menjadi kredit petani biaya pembangunan kebun hingga menghasilkan (biaya pembersihan dan persiapan lahan, bibit, dan sarana produksi) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan tanpa disertai pembebanan bunga dan jasa manajemen

pembangunan kebun yang dilakukan oleh PT. Sawindo Kencana. Konsep pembebanan biaya ini berbeda dengan pola PIR dimana jumlah biaya pembangunan kebun plasma dihitung berdasarkan unit cost ditambah dengan *overhead*, jasa manajemen sebesar 15% serta biaya bunga selama masa pembangunan (Rifai, 2008). Sedangkan, pola KKPA beban kredit yang menjadi tanggungan petani hanya pada biaya pembangunan kebun kelapa sawit yang disesuaikan dengan kebutuhan seluruh biaya pembangunan kebun dan tingkat bunga yang berlaku (Rifai et al., 2008). Untuk pola revitalisasi yang berkembang saat ini, beban kredit yang menjadi tanggungan petani yaitu biaya pembangunan ditambah dengan manajemen fee sebesar 5% dan bunga pinjaman selama masa pembangunan yang dikenakan sebesar 10% sedangkan sisanya ditanggung pemerintah (Ditjenbun, 2007). Pembebanan kredit tanpa bunga pada pola KKSR

Tabel 3. Plafon kredit pengembangan KKSR I di Kabupaten Bangka tahun 2004.

| No | Kelompok Tani | Desa | Plafond Kredit (Rp/2ha) | Jumlah Anggota | Total Krcedit |
|-----------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| 1 | Suka Jaya | Kotawaringin | 13,919,177 | 25 | 347,979,425 |
| 2 | Maju Bersama | Tanah Bawah | 14,052,017 | 25 | 351,300,425 |
| 3 | Karya Bakti | Nibung | 14,161,020 | 21 | 297,381,420 |
| 4 | Harapan Masa Depan | Labu | 13,786,877 | 29 | 399,819,433 |
| 5 | Bina Karya Sejahtera | Saing | 13,995,857 | 25 | 349,896,425 |
| Total Plafond Kredit | | | | | 1,746,377,128 |

Tabel 4. Plafon kredit pengembangan KKSR II di Kabupaten Bangka tahun 2007.

| No | Kelompok Tani | Desa | Plafond Kredit (Rp/2ha) | Jumlah Anggota | Total Krcedit |
|-----------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| 1 | Masa Depan | Pangkal Niur | 28.999.759 | 22 | 637.994.698 |
| 2 | Harapan Makmur | Neknang | 27.656.605 | 25 | 691.415.125 |
| 3 | Jaya Lestari | Kotawaringin | 29.890.359 | 21 | 627.697.539 |
| 4 | Nyatoh Raya | Saing | 36.904.997 | 29 | 1.070.244.913 |
| 5 | Maju Bersama II | Tanah Bawah | 27.946.355 | 25 | 698.658.875 |
| 6 | Tunas Karya | Nibung | 34.882.930 | 36 | 1.255.785.480 |
| 7 | Harapan Masa Depan II | Labu | 36.592.408 | 26 | 951.402.608 |
| 8 | Karya Mandiri | Sempan | 33.884.330 | 32 | 1.084.298.560 |
| Total Plafond Kredit | | | | | 7.017.497.798 |

Sumber : PT. SWKa

tentunya tidak terlalu membebani pekebun mitra. Besaran biaya investasi terdapat pada Tabel 3 dan 4.

Pada Tabel 3 dan 4 menunjukkan terdapat perbedaan nilai plafon kredit pada setiap desa, hal ini disebabkan terjadi perbedaan karakteristik di lapangan yang memerlukan perlakuan teknis tertentu yang berbeda antara desa yang menimbulkan perbedaan biaya investasi. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik utama kesesuaian lahan berkorelasi terhadap jenis dan nilai investasi proyek pembangunan perkebunan (Agustira *et al.*, 2008).

Jika dibandingkan dengan plafon kredit perluasan perkebunan kelapa sawit dalam kredit program revitalisasi perkebunan tahun 2007 per ha, yaitu sebesar Rp 24.181.000,- untuk wilayah Provinsi Bangka Belitung (untuk 2 ha beban kredit sebesar 48.362.000) (Ditjenbun, 2007), maka plafon kredit KKSR II pada tahun 2007 lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan kebun KKSR tersebut dinilai cukup efisien.

Produktivitas Tanaman

Produktivitas tanaman merupakan salah satu indikator keberhasilan program pengembangan perkebunan (Syafaat *et al.*, 2004). Produktivitas rata-rata pekebun kelapa sawit dari 50 sampel pola KKSR di kabupaten Bangka dan Bangka Barat dengan tahun tanam 2004 dan 2007 sebesar 15,26 ton TBS/ha/tahun. Rata-rata produktivitas pekebun rakyat KKSR I (tahun tanam 2004) sebesar 20,62 ton TBS/ha/tahun (dengan rentang produktivitas 12 s.d 30 TBS/ha/tahun) atau 89,65% dari potensi produksi kelas lahan S3 standar PPKS sebesar 23 ton TBS/ha/tahun. Sedangkan rata-rata produktivitas pekebun rakyat KKSR II (tahun tanam 2007) sebesar 9,90 ton TBS/ha/tahun (dengan rentang produktivitas

6-12 ton TBS/ha/tahun) atau 82,50% dari produktivitas kelas lahan S3 standar PPKS sebesar 12 ton TBS ha/tahun (Tabel 5).

Jika dibandingkan dengan produktivitas pola pengembangan perkebunan PIR dan KKPA yang ada di Sumatera Barat, Riau dan Sumatera Selatan, produktivitas pola KKSR cukup baik. Produktivitas KKPA dan kemitraan di PT.BPP Pasaman Barat untuk tanaman kelapa sawit berumur 3-14 tahun pada kelas lahan S3 hanya mencapai 5-21 ton TBS/Ha/tahun (Yarsi, 2006). Produktivitas kelapa sawit pola KKPA, PIR-Trans, dan swadaya murni di Riau masing-masing mencapai 39,68% - 70,60%, 61,3% - 83,8%, 15,6% - 44% dari standar produktivitas kelas lahan S3 (Rifai *et al.*, 2008). Sedangkan produktivitas rata-rata Proyek PIR di Sumatera Selatan dengan tingkat umur rata-rata 17 tahun sebesar 16 ton/ha/tahun (Bakir, 2007). Dengan capaian produktivitas di atas, menunjukkan bahwa selain faktor kesesuaian lahan dan iklim, produktivitas yang tinggi sebagai indikator pengelolaan kebun yang baik pada sistem kemitraan tersebut.

Pendapatan Petani

Pendapatan rumah tangga pekebun rakyat KKSR dapat bersumber dari kelapa sawit di kebun KKSR dan usaha di luar kebun KKSR. Pendapatan dari kelapa sawit di kebun KKSR merupakan selisih penerimaan TBS dengan biaya total kelapa sawit di kebun KKSR (biaya pemeliharaan tanaman, panen, pemotongan kredit). Pendapatan dari luar kebun KKSR bersumber dari pendapatan kebun karet, lada, dan pendapatan non usahatani (PNS, jasa, dagang, dan sebagainya). Pendapatan bersih rata-rata pekebun rakyat pola KKSR di Kabupaten Bangka dan Bangka Barat sebesar Rp.1.172.474/bulan/ha. Rata-rata pekebun

Tabel 5. Produktivitas tanaman kebun KKSR.

| Kebun | Tahun Tanam | Umur Tanaman (Tahun) | Standar Produktivitas KKL S3 (Ton/Ha/Thn) | Rentang Produksi (TonTBS/Tahun) | Produktivitas Rata-rata (Ton/Ha/Thn) | Capaian Terhadap Standar Produktivitas (%) |
|---------|-------------|----------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|
| KKSR I | 2004 | 7 | 23,0 | 12-30 | 20,62 | 89,65 |
| KKSR II | 2007 | 4 | 12,0 | 6-12 | 9,90 | 82,50 |

Sumber : data primer, diolah

Tabel 6. Pendapatan rata-rata pekebun rakyat pola KKSR.

| Uraian | Rp/tahun/2ha | Rp/bulan/2ha | Rp/bulan/ha |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| Penerimaan | 45.712.640 | 3.809.387 | 1.904.693 |
| Biaya | 17.573.262 | 1.464.438 | 732.219 |
| Pendapatan | 28.139.379 | 2.344.948 | 1.172.474 |

Tabel 7. Pendapatan rata-rata pekebun rakyat pola KKSR tahap I dan tahap II.

| Uraian | Tahap I 2004 | | | Tahap II 2007 | | |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|-------------|
| | Rp/tahun/2ha | Rp/bulan/2ha | Rp/bulan/ha | Rp/tahun/2ha | Rp/bulan/2ha | Rp/bulan/ha |
| Penerimaan | 63.894.528 | 5.324.544 | 2.662.272 | 28.890.240 | 2.407.520 | 1.203.760 |
| Biaya | 18.291.644 | 1.524.304 | 762.152 | 12.649.195 | 1.054.100 | 527.050 |
| Pendapatan | 45.602.884 | 3.800.240 | 1.900.120 | 16.241.045 | 1.353.420 | 676.710 |

Tabel 8. Proporsi pendapatan kebun KKSR terhadap total pendapatan keluarga

| Uraian | KKSR 2004 | | KKSR 2007 | | Rerata | |
|----------------------------------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|--------|
| | Rp/tahun | % | Rp/tahun | % | Rp/tahun | % |
| Pendapatan Sawit | 3.800.240 | 76,42 | 1.353.420 | 48,02 | 2.344.948 | 63,99 |
| Pendapatan non Sawit | 1.170.667 | 23,68 | 1.464.800 | 51,98 | 1.319.660 | 36,01 |
| Total Pendapatan Keluarga | 4.970.907 | 100,0 | 2.818.220 | 100,00 | 3.664.608 | 100,00 |

rakyat pola KKSR memiliki lahan 2 ha sehingga pendapatan rata-rata perbulan mencapai Rp.2.344.948 (Tabel 6). Jika dilihat per tahun tanam, pekebun rakyat pola KKSR tahap I tahun 2004 pendapatan bersih rata-rata per bulan sebesar Rp.3.800.240, sedangkan pendapatan rata-rata pekebun rakyat pola KKSR tahap II 2007 sebesar Rp. 1.353.420 (Tabel 7). Jika dibandingkan dengan Upah Minimum Provinsi(UMP) Bangka Belitung tahun 2012 sebesar Rp.1.100.000 dan Upah minimum Kabupaten (UMK) Bangka tahun 2012 sebesar 1.322.500, pendapatan pekebun rakyat KKSR II 123% dan 102% lebih tinggi dari UMP dan UMK yang berlaku di Provinsi Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka. Pendapatan tersebut diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa tahun seiring dengan peningkatan produksi tanaman yang belum memasuki masa puncak produksi. Hal ini menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit pola KKSR dapat memenuhi kebutuhan hidup pekebun rakyat di Kabupaten Bangka.

Pendapatan dari produksi kebun KKSR sangat membantu perekonomian keluarga pekebun. Hal tersebut diketahui dari proporsi pendapatan kebun KKSR menempati 63,99% dari total pendapatan keluarga (Tabel 8). Pendapatan kebun KKSR I (2004) menunjukkan proporsi 76,42% dari total pendapatan keluarga, lebih besar dari pendapatan KKSR II (2007) sebesar 48,02% dari total pendapatan keluarga. Hal ini disebabkan tanaman di kebun KKSR II masih berumur muda sehingga produksinya lebih rendah jika dibandingkan dengan kebun KKSR I. Pendapatan pekebun tersebut masih lebih besar jika dibandingkan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bangka Belitung sebesar Rp 1.024.000- per bulan.

Kendala Pelaksanaan Kemitraan KKSR dan Pemecahannya

Dalam perkembangannya sistem kemitraan pola KKSR dinilai cukup berhasil dalam pencapaian tujuannya yaitu peningkatan kesejahteraan dan

pendapatan pekebun kelapa sawit. Indikator keberhasilan tersebut dilihat dari (1) keberhasilan pembangunan kebun KKSR I tahun 2004 dan dilanjutkan dengan pembangunan KKSR II tahun 2007, (2) kemudahan pekebun rakyat dalam membangun kebun kelapa sawit dengan pola KKSR melalui pinjaman bibit unggul dan sarana produksi, (3) dampak ekonomi terhadap pendapatan keluarga pekebun, (4) terlaksananya program kemitraan yang dilaksanakan oleh perusahaan dan terlaksana program pemkab Bangka dalam pemanfaatan potensi daerah melalui pengembangan perkebunan kelapa sawit. Namun disisi lain, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kemitraan KKSR di Bangka. Kendala tersebut terdapat pada ketiga subsistem KKSR yaitu pemkab, perusahaan dan petani.

A. Kendala di tingkat pemerintah Kabupaten

Sosialisasi awal pembangunan Kebun

Sosialisasi awal pembangunan kebun KKSR oleh Pemkab melalui Dinas Perkebunan menghadapi berbagai kendala terutama mengubah pola pikir masyarakat yang masih menganggap program KKSR hanya bantuan gratis bukan pemberdayaan, sehingga memerlukan pengontrolan yang sangat ketat pada awal pembangunan kebun. Disamping itu, masih awamnya pengetahuan masyarakat terhadap sawit sehingga menimbulkan keraguan masyarakat terhadap kelapa sawit yang membawa dampak kesejahteraan bagi masyarakat. Hal lain yang menjadi kendala dalam sulitnya sosialisasi yaitu keraguan terhadap pelaksanaan program kemitraan KKSR, dimana pernah terjadi kegagalan program plasma yang pernah dibangun oleh perusahaan di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Bangka. Dalam mengubah pola pikir dan meyakinkan pekebun dilakukan sosialisasi yang intensif dengan sistem komunikasi, negoisasi, transparansi dan realisasi program yang tepat agar menimbulkan komitmen peserta kemitraan yang menunjang keberhasilan program. Kunci keberhasilan dalam mengatasi kendala penerimaan masyarakat terhadap suatu perubahan adalah komunikasi, transparansi dan realisasi tindakan yang direncanakan (Puspitawati, 2004).

Status lahan

Status lahan menjadi kendala dalam pelaksanaan kemitraan KKSR terutama pada KKSR II di Bangka Barat, dimana lahan yang diajukan pekebun rakyat termasuk kawasan hutan akibat dari perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka Barat. Kendala ini menghambat pengembangan KKSR II di Bangka Barat seluas 425 ha. Sedangkan kendala persyaratan sertifikat kepemilikan tanah seperti di program revitalisasi (Dja'far *et al.*, 2010), tidak menjadi kendala karena yang dipersyaratkan yang menjadi jaminan adalah surat tanah berupa surat keterangan lahan dari camat atau kepala desa. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan penyusunan RTRWP yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih status lahan.

Administrasi pengadaan sarana produksi

Administrasi pengadaan sarana produksi menjadi kendala dalam pelaksanaan KKSR. Sistem administrasi penggunaan anggaran daerah yang prosuderal dan kehati-hatian pemegang anggaran dalam hal ini dinas perkebunan menjadi hambatan dalam pengadaan sarana produksi. Akibatnya dana pengadaan sarana produksi sering terlambat dan berdampak pada peserta program KKSR. Oleh karena itu, perlu adanya transparansi dalam penggunaan anggaran serta pengawasan yang baik dalam penyaluran bantuan sarana produksi kepada pekebun.

B. Kendala di tingkat perusahaan mitra

Keberadaan PKS tanpa kebun

Keberadaan PKS tanpa kebun (PKSTK) disekitar kebun KKSR mitra PT. SWK menjadi kendala terbesar dalam pelaksanaan KKSR terutama di Kabupaten Bangka. Setidaknya ada 2 PKSTK dengan kapasitas 45 ton TBS/jam beroperasi sejak tahun 2010 disekitar perkebunan KKSR bahkan berdampingan dengan kebun KKSR. PKS tanpa kebun memberikan harga TBS lebih tinggi dari harga TBS ketetapan Gubernur Bangka Belitung sebesar Rp.40-150. Hal ini meresahkan PT SWK dimana TBS yang dihasilkan ke kebun KKSR dan kemitraan lainnya seperti KKPA banyak di masukkan ke PKS tanpa kebun. Tawaran harga yang tinggi, kemudahan dalam sortasi dan pengangkutan TBS hingga ke TPH menjadi daya tarik



tersendiri bagi pekebun rakyat KKSR untuk menjual TBSnya ke PKSTK yang merusak hubungan kemitraan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan pekebun KKSR yang masih murni menyalurkan TBSnya adalah sebesar 60%, sedangkan 28% menjual ke PKS mitra dan PKSTK, dan 12% tidak menjual TBS ke PKS mitra. Pekebun KKSR yang menjual seluruh produksi TBS nya ke PKS mitra memiliki alasan telah berhutang budi karena telah dibantu program KKSR dan tetap mengikuti komitmen terhadap perjanjian yang telah disepakati, namun 24% dari pekebun KKSR yang menjual seluruh hasil produksinya merencanakan hanya sampai kredit lunas. Hal ini menunjukkan ke depan akan terjadi masalah terhadap pasokan TBS ke PKS mitra.

Disatu sisi PKSTK memberikan dampak positif bagi pengembangan perkebunan rakyat dengan mengurangi persaingan pasar TBS di tingkat pekebun (Dja'far *et al.*, 2007). Namun PKSTK yang berada di sekitar perkebunan kemitraan (PIR, KKPA, Revitalisasi, KKSR) akan berdampak negatif terhadap hubungan kemitraan. Masuknya pelaku lain di luar sistem produk seperti PKSTK dan pedagang pengumpul akan merusak hubungan kemitraan (Zuhri, 2008). Penawaran harga yang cenderung lebih tinggi daripada PKS mitra menyebabkan pekebun sawit rakyat mengalihkan penjualan TBS ke PKSTK sehingga mengganggu kontinuitas PKS mitra, terhambatnya pelunasan kredit hingga konflik sosial sehingga untuk hubungan jangka panjang perusahaan perkebunan enggan bermitra dengan pekebun rakyat (Anonim, 2008).

Keberadaan Pedagang Pengumpul

Keberadaan PKSTK menyebabkan banyaknya pedagang pengumpul TBS. Pedagang pengumpul sebagai jalur pengadaan TBS bagi PKSTK, memberikan kemudahan kepada pekebun rakyat KKSR agar dapat menjual TBS ke PKSTK. Pedagang pengumpul bersedia membeli TBS di tempat pengumpulan hasil (TPH) dan memberikan pinjaman modal untuk perawatan kebun dan membeli pupuk ataupun untuk keperluan konsumsi (pendidikan, pesta, hari besar agama) yang dibayar melalui penjualan TBS dengan sistem ijon. Hal ini membuat banyaknya petani terjebak dengan hutang di luar kemitraan dengan pedagang pengumpul, sehingga tidak dapat

mematuhi komitmen terhadap perjanjian yang disepakati (Wigena *et al.*, 2009). Salah satu pemecahan dari masalah ini yaitu dengan meningkatkan harmonisasi hubungan kemitraan antara pekebun dengan perusahaan mitra sehingga pekebun berkomitmen untuk menjual hasil panen TBS ke perusahaan.

C. Kendala bagi Pekebun KKSR

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat 5 kendala utama dalam pelaksanaan KKSR yaitu Konsistensi penyuluhan (35,11%), terlambatnya sarana produksi (25,53%), koordinasi kelompok (21,28%), permasalahan harga (17,02%) dan kurangnya infrastruktur 1% (Gambar 2).

Kontinuitas Penyuluhan dan Pendampingan

Kontinuitas penyuluhan dan pendampingan oleh PT. SWK menjadi kendala terbesar bagi pekebun KKSR. Pada awal pembangunan dan masa sebelum pelunasan kredit, PT. SWK secara rutin mengunjungi pekebun KKSR dan memberikan pendampingan, namun dalam kurun waktu 2008-2011 petugas pendamping dari PT. SWK jarang melakukan kunjungan. Hal ini menyebabkan pekebun KKSR mengalami kesulitan bertanya jika ada masalah. Dengan kondisi tersebut tentunya tidak menimbulkan rasa empati pekebun KKSR untuk melanjutkan hubungan kemitraan. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan komitmen manajemen kebun untuk melaksanakan kegiatan pembinaan kepada petani dan pengawasan kegiatan pembinaan di lapangan.

Terlambatnya sarana produksi

Terlambatnya sarana produksi seperti pupuk dan obatan-obatan menjadi kendala bagi pekebun rakyat. Kendala tersebut terjadi terutama pada KKSR II diakibatkan kendala administrasi di Pemkab. Terhambatnya sarana produksi menyebabkan terlambatnya waktu pemupukan dan perawatan yang menghambat pertumbuhan tanaman. Pekebun KKSR akhirnya meminjam modal ke pedagang pengumpul untuk modal perawatan tanaman yang nantinya akan dibayar dengan produksi TBS. Keterlambatan ini seharusnya dapat dicegah melalui pelaksanaan proses birokrasi yang efisien dan tidak berbelit-belit,

sehingga tidak berdampak pada keterlambatan pemberian bantuan.

Koordinasi Kelompok

Kegiatan kelompok tani terdiri dari kegiatan perawatan tanaman, panen, pengadaan sarana produksi, pemasaran dan penyuluhan. Permasalahan koordinasi kelompok tani terutama berkaitan dengan pemasaran TBS. Beberapa anggota kelompok tani tidak mau TBS hasil produksinya di jual ke PKS mitra karena harganya lebih rendah. Hal ini menyebabkan terjadi perpecahan pada kelompok tani yang menyebabkan beberapa kelompok tani tidak aktif dalam melakukan kegiatannya. Oleh karena itu, komunikasi dan rasa kekeluargaan antar anggota kelompok terus ditanamkan untuk meningkatkan loyalitas dan komitmen anggota terhadap kelompok tani.

Harga TBS

Harga TBS di PKS mitra yang lebih rendah di bandingkan dengan PKSTK menjadi permasalahan yang menimbulkan konflik kemitraan antara pekebun KKSR dengan PT. SWK. Pekebun KKSR mencurigai terjadi kecurangan yang dilakukan PT. SWK terhadap harga yang ditentukan, walaupun harga tersebut berasal dari ketetapan Gubernur. Kondisi tersebut tidak pernah terjadi sebelum PKSTK beroperasi. Pekebun KKSR mengharapkan ada standarisasi dan transparansi harga TBS agar tidak konflik kemitraan, tidak hanya di tingkat pekebun dengan PT. SWK, tetapi juga konflik antara pekebun KKSR di kelompok tani.

Rusaknya Infrastruktur Kebun

Rusaknya infrastruktur kebun seperti jalan, parit dan jembatan menyebabkan pengangkutan TBS tidak optimal dan menimbulkan biaya tinggi untuk melangsir ke TPH dan mengangkutnya ke PKS. Kesulitan tersebut menyebabkan pekebun KKSR lebih suka menjual TBS ke pedagang pengumpul karena bersedia membeli TBS di TPH, sehingga tidak perlu mengalami kesulitan dalam melangsir TBS dan mengeluarkan biaya untuk pengangkutan ke PKS. Dalam menangani permasalahan infrastruktur ini tidak hanya perlu peran serta pemerintah maupun perusahaan, akan tetapi peran serta masyarakat juga diperlukan dalam menjaga infrastruktur kebun.

Upaya Perbaikan Hubungan Kemitraan

Konsepsi kemitraan perusahaan perkebunan bermitra dengan petani yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat, dan saling membutuhkan (UU No.18, 2004). Dalam prakteknya, konsepsi dan struktur kemitraan yang sudah dirumuskan dengan baik seringkali mengalami berbagai kendala dan bahkan terhenti. Hal tersebut terjadi karena masih adanya sejumlah ketimpangan dalam pelaksanaan pemberdayaan yang menjadi inti dalam pelaksanaan kemitraan (Fadjar, 2006).

Berdasarkan kajian kemitraan KKSR di Bangka, dapat dipahami bahwa konsep KKSR didesain melalui pemberdayaan pekebun dengan memanfaatkan potensi alam yang mendukung dengan adanya lahan yang sesuai untuk dibangun perkebunan kelapa sawit. Potensi kedua yaitu sumber daya manusia (SDM) pekebun rakyat, dimana pekebun rakyat selain memiliki lahan memiliki tenaga fisik untuk melaksanakan kegiatan perkebunan dan akal pikiran untuk menerima teknologi budidaya perkebunan Kelapa sawit. Faktor terpenting lainnya dalam pelaksanaan kemitraan yaitu mental pekebun rakyat. Hal ini menjadi perhatian yang penting oleh Pemkab Bangka dan PT. SWK di awal berdirinya kemitraan KKSR. Mental pekebun rakyat yang terlalu mengharapkan bantuan tanpa usaha, lebih mementingkan keuntungan pribadi diubah melalui sistem pemberdayaan melalui proses penumbuhan kerjasama (gambar 1).

Proses penumbuhan kerjasama kemitraan dibentuk melalui proses persahabatan dan silaturahmi yang membangun kebersamaan pola pikir, sehingga menciptakan kekuatan melalui kebersamaan. Dengan adanya proses kebersamaan akan menimbulkan kepercayaan untuk melakukan kerjasama ekonomi melalui kemitraan perkebunan. Konsep ini telah dilakukan diantara perusahaan, pekebun rakyat dan pemerintah di awal pembangunan KKSR. Namun konsep ini lambat laun bergeser akibat tidak konsistensi masing-masing pihak dalam melaksanakan komitmen. Pihak perusahaan tidak konsisten melakukan pembinaan secara rutin sehingga menimbulkan rasa ketidakpedulian terhadap pekebun. Pemerintah setelah KKSR menghasilkan kurang melakukan koordinasi dengan perusahaan dan pekebun dan mengeluarkan izin PKSTK beroperasi di sekitar kebun kemitraan. Keberadaan PKSTK tersebut merusak tatanan



Gambar 1. Proses penumbuhan kerjasama.

kemitraan yang membuat pekebun rakyat tidak konsisten menaati kesepakatan kemitraan dengan menjual TBS ke PKSTK

Untuk itu beberapa hal yang perlu diupayakan untuk memperbaiki kemitraan yaitu

1. Konsistensi Pendampingan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa 35,11% kendala di pekebun KKSJR adalah tidak konsistennya perusahaan melakukan kunjungan kebun, sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan terhadap kelompok tani. Dari hasil penelitian, 59,38% dari pekebun rakyat sangat mengharapkan konsistensi pendampingan dari perusahaan, untuk mempererat kemitraan. Penyuluhan dan pendampingan tentunya akan meningkatkan ikatan emosional (kebersamaan, saling percaya) antara pekebun dengan perusahaan mitra (Husein dan Hanafi, 2005).

2. Pengendalian dan Monitoring terhadap PKSTK oleh Pemerintah

Kehadiran PKSTK di satu sisi telah memberikan alternatif pasar bagi petani ataupun pekebun sawit untuk mendapatkan tingkat harga yang baik. Namun akan menjadi permasalahan mengganggu pasar secara signifikan bahkan

berpotensi mengarah pada bentuk persaingan tidak sehat berkaitan dengan harga sehingga merusak hubungan kemitraan. Untuk itu, pemerintah melakukan pengendalian terhadap PKSTK agar pembelian TBS dilakukan secara transparan, legal dan pengaturan harga yang wajar berdasarkan ketetapan harga TBS Gubernur. Standarisasi dan pengaturan harga sangat diharapkan pekebun sebesar 12,51% untuk memperbaiki hubungan kemitraan.

3. Tranparansi (Keterbukaan)

Tranparansi merupakan landasan utama dalam melakukan hubungan kemitraan. Sikap keterbukaan (transparansi) pengelolaan antara perusahaan mitra dengan pekebun rakyat merupakan kunci sukses dalam pengelolaan kemitraan (Global Humanitarian Platform, 2007). Sikap kurang keterbukaan pekebun rakyat dalam menjual hasil produksinya menjadi permasalahan utama bagi perusahaan mitra, sedangkan sikap kurang transparan PKS perusahaan mitra dalam melakukan pemotongan harga dan denda terhadap mutu TBS pekebun rakyat mendapat perhatian pekebun rakyat sebesar 20,56% untuk perbaikan hubungan kemitraan.

4. Meningkatkan Komitmen Pelaksanaan Kemitraan

Peningkatan komitmen terhadap tanggung jawabnya masing-masing perlu dilakukan oleh ketiga sub sistem KKSR yaitu perusahaan mitra, pemerintah, dan pekebun rakyat. Komitmen perusahaan dengan tetap melakukan pendampingan secara rutin. Pemerintah memperlancar bantuan kredit pengadaan sarana produksi selama masa pembangunan. Kelancaran sarana produksi menjadi permasalahan bagi KKSR II dimana pekebun rakyat sebanyak 7,35% menyoroti komitmen pemkab dalam penyediaan sarana produksi. Hal utama yang tidak terlepas adalah komitmen pekebun rakyat terhadap penjualan hasil produksi TBS hingga masa akhir produksi 25 tahun mengingat adanya penawaran harga TBS yang lebih tinggi dari PKSTK, penawaran bantuan pinjaman modal dan konsumsi dari pedagang pengumpul, serta kemudahan dalam penjualan produksi. Peningkatan komitmen dapat dilakukan dengan dasar transparansi, kebersamaan, musyawarah, dan kesetaraan diantara ketiga subsistem KKSR.

KESIMPULAN

Pola KKSR adalah salah satu bentuk kemitraan yang disolusikan untuk mengintegrasikan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan usaha pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit. Pola KKSR yang mensinergikan perusahaan perkebunan (penyedia bibit unggul, penyuluhan dan pemasaran), pekebun rakyat (lahan dan tenaga kerja), pemerintah (sarana produksi) dapat dijadikan sebagai alternatif dalam pengembangan perkebunan. Pendampingan secara konsisten oleh perusahaan, komunikasi, transparansi, realisasi tindakan yang direncanakan, konsisten dalam pelaksanaan komitmen bersama dan dukungan kebijakan pemerintah yang tepat melalui peraturan dan perundang-undangan menjadi kunci sukses dalam pelaksanaan pola KKSR. Dengan beberapa perubahan tersebut, diharapkan KKSR dapat dijadikan sebagai alternatif kemitraan pada pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustira, M.A., A. Kurniawan, Dja'far, D. Siahaan, dan T. Wahyono. 2008. Tinjauan ekonomi industri kelapa sawit. Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Medan.
- Anonim, 2008. Evaluasi kebijakan perkebunan. Komisi pengawas persaingan usaha (KPPU). Jakarta.
- Anwar, M. and Herwany. 2011. Strategic alliance between nucleus-plasma in small medium enterprise in Indonesia. 3rd Upaya International Annual Symposium on Management. Global Business Networking, Opportunities to be World Class Enterprise 15-16 March 2006 Bandung.
- Badrun, M. 2010. Tonggak perubahan : melalui PIR kelapa sawit membangun negeri. Jakarta : Direktorat Jenderal Perkebunan.
- Bakir, H.L. 2007. Kinerja perusahaan inti rakyat kelapa sawit di Sumatera Selatan. Disertasi Doktor. Program Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Dja'far, M.A. Agustira, dan R. Nurkhoiry. 2007. Polemik keberadaan PKSTK dalam Industri Kelapa Sawit Indonesia. *Warta PPKS* Vol.15(3):26-39.
- Dja'far and R. Nurkhoiry. 2010. Evaluation of oil palm revitalization program for Indonesian smallholders. *Proceeding International Oil Palm Conference 1-3 June 2010, Yogyakarta, Indonesia*
- Ditjenbun. 2007. Pedoman umum program revitalisasi perkebunan kelapa sawit, karet dan kakao. Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian, Jakarta.
- Fadjar, U. 2006. Kemitraan usaha perkebunan perubahan struktur yang belum lengkap. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Vol. 24(1) : 46-60.
- Global Humanitarian Platform. 12 Juli 2007. Principles of partnership: a statement of commitment. www.globalhumanitarianplatform.org. diakses tanggal 10 Desember 2011.



- Herman dan U. Fadjar. 2000. Kajian terhadap kinerja penerapan lima pola pengembangan perkebunan. Lembaga Riset Perkebunan Indonesia. Bogor.
- Husein, H. dan Hanafi. 2005. Peranan pemerintah daerah dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat. Prosiding Seminar Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat: Pemberdayaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat sebagai Upaya Penguatan Ekonomi Kerakyatan. Pekan Baru, 15 -16 April 2005.
- Puspitawati, E. 2004. Analisis kemitraan antara PT Pertani (Perser) dengan petani penangkat benih padi di Kabupaten Kerawang. Thesis. Institut Pertanian Bogor
- Rifai, A., S. Hadi, dan N. Qomar. 2008. Studi pengembangan kelapa sawit rakyat di provinsi riau. Sagu. September 2008 vol.7 No. 2 :1-6.
- Syafaa't. N., F. Supena, M. Sudi, dan Suryadi. 2004. Kinerja nilai tambah dan produksi sektor pertanian. PSE litbang Deptan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor
- Suci, F.H. 2011. Kajian kemitraan pada PT Agrowiyana Kabupaten Tanjung Barat Provinsi Jambi. Skripsi. Departemen Agribisnis. IPB, Bogor.
- Ustha, M. 2006. Pengalaman PTPN V dalam mengembangkan perkebunan Kelapa sawit rakyat. Seminar Nasional Pembiayaan Pengembangan Perkebunan Rakyat, Jarak Pagar dan Industri Biodiesel, Bogor 23 Februari 2006.
- Wigena. I.G.P., S. Hermanto, Sudradjat, dan R.P.S. Santun. 2009. Design model pengelolaan kebun kelapa sawit plasma berkelanjutan berbasis pendekatan sistem dinamis. Jurnal Agroekonomi, Vol. 27(1) Mei 2009: 81-108.
- Yarsi, A. 2006. Analisis pendapatan dan penyerapan tenaga kerja pada sistem kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit (kasus pola kemitraan di PT Perkebunan Nusantara VI dan PT Bakrie Pasaman Plantation, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat). Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Zuhri, I. 2008. Pengaruh alokasi tenaga kerja keluarga terhadap pendapatan petani plasma PIR kelapa sawit pasca konversi di Sumatera Selatan. Disertasi Doktor. Program Pascasarjana. Universitas Padjajaran Bandung.
- Zuhri, S. 2011. Revitalisasi perkebunan baru terealisasi 6,2%. [http://www. Bisnis.com](http://www.Bisnis.com).